

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”. Mempersiapkan peserta didik yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah memberikan bekal keterampilan sesuai kompetensi keahlian yang terdapat di sekolah tersebut. Selain itu pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan peserta didiknya dalam beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di kemudian hari. Atas dasar itu, Kementerian Pendidikan Nasional melalui pusat kurikulum badan penelitian dan pengembangannya mengatakan bahwa dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan menengah kejuruan (SMK) harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkenaan dengan kualitas lulusan sekolah kejuruan, Finch dan Crunkilton dalam Jubaedah (2009;1), mengatakan bahwa :

Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau *in-school success standards* dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau *out-of school* meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kualitas lulusan sekolah

kejuruan yang kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang dimunculkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya.

Namun pendidikan dengan sistem ini memiliki kelemahan. Djonegoro (1993:67) mengungkapkan perbedaan sistem nilai dalam sekolah dan dunia usaha sebagai berikut :

Suatu hal yang perlu dicermati oleh sekolah dan dunia usaha yaitu adanya perbedaan sistem nilai yang berlaku pada kedua lembaga tersebut. Di sekolah umumnya hasil kerja dinilai dengan angka 0-10 atau 10-100, resiko gagal masih ditolerir, toleransi penggunaan waktu agak longgar, kegagalan dan keterlambatan tidak selalu diartikan sebagai kerugian, semangat dan motivasi peserta didik tergantung kecakapan guru, sulit membentuk etos kerja karena lingkungan sekolah santai, lamban mengikuti kemajuan Ipteks, lingkungan teori, dan praktik yang dilakukan masih merupakan simulasi. Di lingkungan dunia usaha/industri hasil pekerjaan diukur dengan diterima atau ditolak, resiko kegagalan bisa fatal berarti rugi uang dan reputasi rusak, penggunaan waktu yang ketat, kegagalan dan keterlambatan dianggap/sebagai kerugian, lingkungan kerja memberi kesempatan setiap orang untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerjanya, kondisi mendorong membentuk etos kerja, lebih cepat mengikuti kemajuan Ipteks, lingkungan kerja dan praktik yang dilakukan berorientasi pasar.

Di lain pihak Penelitian Sumardi (2002), Suherman dan Yayat (2003) pada SMK menunjukkan bahwa, (1) implementasi kurikulum belum sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditentukan, pengelolaan kurikulum masih bersifat sentralistik dan sedikit memberi ruang gerak sekolah dan guru dalam mengembangkannya, (2) rendahnya tingkat performansi kerja lulusan SMK di lapangan kerja, sebagian saja yang mempunyai kemampuan dan prestasi kerja yang dipersyaratkan, (3) kualitas tamatan SMK sebagian besar belum mencapai kompetensi-kompetensi standar kerja minimal yang dipersyaratkan, dan (4) tamatan

SMK belum memiliki kemampuan daya suai dan kemandirian dalam bekerja. Hal ini diperkuat hasil penelitian Munawar (2001:37) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta didik SMK cenderung bersikap kurang positif terhadap wiraswasta dan rendah kreativitasnya. Sebagai perbandingan dari hasil penelitian tersebut, berikut ini akan diperlihatkan table 1.1. tentang stándar kompetensi lulusan SMK dari Depdiknas (2007:73-75):

Tabel 1.1.
Uraian Stándar Kompetensi Lulusan SMK

No	Standar Kompetensi Lulusan
1	Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja.
2	Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
3	Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.
4	Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial
5	Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
6	Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif
7	Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
8	Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri.
9	Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
10	Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks.
11	Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial.
12	Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
13	Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14	Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
15	Mengapresiasi karya seni dan budaya

	Lanjutan Tabel 1.1.
16	Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok
17	Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan.
18	Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun
19	Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di Masyarakat
20	Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain,
21	Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis
22	Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris
23	Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya.

Sosia lisasi KTSP-Departemen Pendidikan Nasional 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), mengatakan bahwa: “Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, pengetahuan, dan keterampilan”. Mencermati stándar kompetensi lulusan dalam tabel 1.1. maka lulusan SMK tidak hanya dituntut terampil dalam kompetensi kejuruannya, melainkan juga terampil dalam kompetensi sosialnya (*social skill*).

Maryani, (2008:38) menjelaskan pengertian keterampilan sosial sebagai berikut :

Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan, penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi serta mampu mengembangkan aspirasi dan menampilkan diri dengan ciri saling menghargai, mandiri, mengetahui tujuan hidup, disiplin dan mampu membuat keputusan secara bertanggungjawab.

Salah satu mata pelajaran yang secara khusus memberikan muatan keterampilan sosial di SMK adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS di Sekolah Menengah Kejuruan merupakan mata pelajaran yang termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran adaptif. Uraian tentang kelompok mata pelajaran yang berisi deskripsi kelompok mata pelajaran spesifik SMK, merujuk kepada Permen 22 tahun 2006, meliputi tiga kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok normatif, kelompok adaptif, dan kelompok produktif. Kelompok normatif adalah kelompok mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan. Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan.

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Maryani, 2011:12) fungsi Mata Pelajaran IPS dijelaskan sebagai berikut :

Fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang terdapat dalam ilmu pengetahuan sosial berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial dan yang direfleksikan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Sebagai upaya lebih memahami karakteristik mata pelajaran IPS di SMK, Nana Supriatna dalam makalahnya (2007) menguraikan pembelajaran IPS di SMK bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya
2. Berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial
3. Berkomitmen terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan
4. Berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global.

Di lain pihak, mata pelajaran IPS masih dipandang peserta didik sebagai pelajaran yang membosankan dan dirasa kurang relevan dengan kehidupan mereka seperti yang ditulis dari hasil penelitian Stahl (2008:3) bahwa:

Studies classes are dull, boring, and irrelevant to their lives. If the curriculum in social studies is to continue to have support from school administrators, politicians, and the general public, it is desirable to have positive student attitudes towards the subject matter. For it is quite possible that negative attitudes toward social studies could ultimately result in a sharp decline in the allocation of resources for this subject area.

Selanjutnya guru dan lingkungan pembelajaran diindikasikan oleh Haladyna and Shaughnessy (Stahl, 2008:8) memegang peranan yang kuat dalam membentuk sikap peserta didik terhadap IPS. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dalam kelas. Iklim kelas dan sikap peserta didik dapat diubah melalui intervensi guru dalam membangun citra terhadap studi sosial, oleh karena itu pembelajaran IPS perlu diupayakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran IPS yang bermakna (Maryani, 2011:2).

Upaya mempersiapkan peserta didik SMK sebelum memasuki dunia kerja terutama dalam hal pengembangan sikap dan budaya kerja salah satunya melalui pembelajaran IPS di sekolah. Pembelajaran IPS diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengatasi rendahnya keterampilan sosial peserta didik lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui pemahaman pengetahuan dan karakteristiknya, pembelajaran IPS memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk memperoleh bekal pengetahuan tentang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial.

Jawa Barat memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan berbagai program keahlian yang diharapkan mampu menyumbangkan lulusannya menjadi tenaga kerja khususnya untuk dunia usaha dan dunia industri yang tersebar di daerah Jawa Barat dan umumnya di luar wilayah Jawa Barat. Tabel 1.2. berikut ini menunjukkan sebaran SMK di daerah Jawa Barat:

Tabel 1.2.
Jumlah SMK per Kota/Kabupaten Di Jawa Barat

No	Kota/Kabupaten	Status		Jumlah SMK
		Negeri	Swasta	
1	Kabupaten Bogor	5	185	190
2	Kabupaten Sukabumi	10	60	70
3	Kabupaten Cianjur	21	36	57
4	Kabupaten Bandung	9	69	78
5	Kabupaten Garut	12	45	57
6	Kabupaten Tasikmalaya	4	52	56
7	Kabupaten Ciamis	9	44	53
8	Kabupaten Kuningan	8	26	34
9	Kabupaten Cirebon	7	59	66
10	Kabupaten Majalengka	9	25	34
11	Kabupaten Sumedang	6	47	53
12	Kabupaten Indramayu	19	46	65

13	Kabupaten Subang	5	48	53
14	Kabupaten Purwakarta	5	21	26
15	Kabupaten Karawang	8	50	58
16	Kabupaten Bekasi	12	82	94
17	Kota Bogor	5	63	68
18	Kota Sukabumi	4	17	21
19	Kota Bandung	15	107	122
20	Kota Cirebon	2	15	17
21	Kota Bekasi	8	82	90
22	Kota Depok	2	87	89
23	Kota Cimahi	3	18	21
24	Kota Tasikmalaya	4	32	36
25	Kota Banjar	3	7	10
26	Kabupaten Bandung Barat	3	40	43
Jumlah		198	1363	1561

Sumber: Direktorat Pembinaan SMK 2011

Persebaran kompetensi keahlian SMK di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel

1.3.berikut ini :

Tabel 1.3.
Persebaran Kompetensi Keahlian pada SMK di Jawa Barat

No.	JURUSAN	JUMLAH
1	Teknologi dan Rekayasa	623
2	Teknik Informasi dan Komunikasi	634
3	Kesehatan	108
4	Seni, Kerajinan, dan Pariwisata	151
5	Agribisnis dan Argoindustri	75
6	Bisnis Manajemen	620
Jumlah		2211

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK 2011

Propinsi Jawa Barat juga memiliki sejumlah SMK RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang tersebar di berbagai wilayah kota dan kabupaten. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar

Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Tujuan program RSBI adalah :

1. Umum

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan amanat Tujuan Nasional dalam Pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, PP No.19 tahun 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan), dan UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menetapkan Tahapan Skala Prioritas Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-1 tahun 2005-2009 untuk meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
- b. Memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas bertaraf nasional dan internasional.
- c. Menyiapkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global.

2. Khusus

Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tercantum di dalam Standar Kompetensi Lulusan yang diperkaya dengan standar kompetensi lulusan berciri internasional.

RSBI/SBI adalah sekolah yang berbudaya Indonesia, karena Kurikulumnya ditujukan untuk Pencapaian indikator kinerja kunci minimal sebagai berikut:

1. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
2. menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK;
3. memenuhi Standar Isi; dan
4. memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

1. Sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masing-masing;
2. Muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dan/ atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; dan
3. Menerapkan standar kelulusan sekolah/ madrasah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Proses. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi Sekolah/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti

luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneurial, jiwa patriot, dan jiwa inovator;

2. Diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari salah satu negaraanggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
3. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran;
4. Pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata pelajaran lainnya, kecuali pelajaran bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia; dan
5. pembelajaran dengan bahasa Inggris untuk mata pelajaran kelompok sains dan matematika untuk SD/MI baru dapat dimulai pada Kelas IV.

Untuk persebaran SMK RSBI di Jawa Barat lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Sebaran SMK RSBI di Jawa Barat.

No	SMK	Status		Jumlah SMK
		Negeri	Swasta	
1	SMK 1 Cibinong	√		1
2	SMK 1 Sukabumi	√		2
3	SMK 3 Sukabumi	√		
4	SMK 1 Cianjur	√		2
5	SMK 1 Pacet	√		
6	SMK 1 Katapang	√		1
7	SMK 1 Garut	√		1
8	SMK 2 Ciamis	√		1
9	SMK 3 Kuningan	√		1
10	SMK 1 Kedawung	√		1

11	SMK 1 Majalengka	√		1
12	SMK 2 Sumedang	√		1
13	SMK 1 Indramayu	√		1
14	SMK 1 Losarang	√		1
15	SMK 2 Cikarang Barat	√		1
16	SMK 7 Bandung	√		3
17	SMK 13 Bandung	√		
18	SMK 9 Bandung	√		
19	SMK 1 Kota Bekasi	√		1
20	SMK 2 Tasikmalaya	√		1
	Jumlah			20

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK 2011

Untuk persebaran kompetensi keahlian yang terdapat di SMK RSBI di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.5.berikut:

Tabel 1.5.
Sebaran Kompetensi keahlian SMK RSBI di Jawa Barat.

No.	Kompetensi Keahlian	Jumlah	Sebaran
1	Bisnis Manajemen	7	SMKN 1 Cianjur, SMKN 1 Garut, SMKN 1 Kedawung, SMKN 2 Sumedang, SMKN 1 Indramayu, SMKN 2 Cikarang Barat, SMKN 1 Bekasi
2	Kesehatan	1	SMKN 7 Bandung
3	Seni, Kerajinan, Pariwisata	6	SMKN 1 Pacet, SMKN 3 Kuningan, SMKN 1 Indramayu, SMKN 3 Sukabumi, SMKN 9 Bandung, SMKN 1 Bekasi
4	Agribisnis, Agroindustri	3	SMKN 1 Sukabumi, SMKN 1 Pacet, SMKN 1 Losarang
5	Teknik Informasi dan Komunikasi	17	SMKN 1 Cibinong, SMKN 1 Sukabumi, SMKN 1 Cianjur, SMKN 1 Pacet, SMKN 1 Katapang, SMKN 1 Garut, SMKN 2 Ciamis, SMKN 3 Kuningan, SMKN 1 Kedawung, SMKN 1 Majalengka, SMKN 2 Sumedang, SMKN 1 Indramayu, SMKN 1 Losarang, SMKN 2 Tasikmalaya, Cikarang Barat, SMKN 13 Bandung, SMKN 1 Bekasi, SMKN 2 Tasikmalaya
6	Teknologi dan Rekayasa	12	SMKN 1 Cibinong, SMKN 1 Katapang, SMKN 2 Ciamis, SMKN 3 Kuningan, SMKN 1 Majalengka, SMKN 1 Sukabumi, SMKN 7 Bandung,

	Lanjutan Tabel 1.5.		SMKN 1 Indramayu, SMKN 1 Losarang, SMKN 13 Bandung, SMKN 1 Bekasi, SMKN 2 Tasikmalaya
	Jumlah	46	

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK 2011

B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa hasil penelitian dikatakan bahwa kelemahan lulusan SMK meliputi pengetahuan kerja, keterampilan kerja, dan sikap/budaya kerja yang tidak sepenuhnya diperoleh oleh para lulusan SMK saat berada di sekolah. Di samping hal tersebut, kesenjangan nilai yang digunakan dunia industri dan sekolah masih memiliki perbedaan. Hal ini akan berdampak pada pencapaian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya antara lain :

1. Metode atau model pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPS yang diterapkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri sehingga diperlukan pembelajaran yang lebih mendekati peserta didik dengan kondisi riil di dunia kerja.
2. Isi pada materi pembelajaran IPS belum mengkondisikan peserta didik pada lingkungan pekerjaan seperti di industri sehingga diperlukan isi materi yang benar-benar sesuai keterampilan sosial yang dibutuhkan dunia industri dan dunia kerja.

3. Terjadi kesenjangan (*gap*) antara pembelajaran IPS yang diterapkan di sekolah dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan.
4. Turunnya motivasi belajar peserta didik yang berdampak pada kompetensi yang ingin dicapai disebabkan model pembelajaran saat ini yang tidak menciptakan suasana akrab, saling menghargai, bekerja sama, dan menyenangkan (*meaning and joyfull learning*).
5. Materi pembelajaran IPS masih bersifat sempit sekedar memenuhi persyaratan nilai sebuah standar kompetensi sehingga peserta didik hanya memenuhi kewajiban hadir dan nilai angka yang diberikan guru pada akhir pembelajaran.
6. Pendidikan Standar Ganda (PSG) yang mewajibkan peserta didik SMK melakukan praktek kerja industri belum mampu memenuhi harapan dunia industri, yaitu tenaga kerja terampil yang siap pakai di dunia kerja karena kesenjangan nilai yang diberlakukan di sekolah dengan di industri.

Belum banyaknya penelitian yang khusus mengenai pembelajaran IPS dalam meningkatkan keterampilan sosial lulusan SMK di dunia kerja menjadi catatan penting bagi peneliti dan menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Efektivitas Proses Pembelajaran IPS dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta didik SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Jawa Barat.

Berpedoman pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa pembelajaran IPS diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial peserta didik SMK RSBI di Jawa Barat.

Dengan adanya pengembangan Mata Pelajaran IPS pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka terdapat beberapa permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana gambaran efektivitas proses pembelajaran IPS di SMK RSBI di Jawa Barat?
2. Bagaimana gambaran keterampilan sosial peserta didik SMK RSBI di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas proses pembelajaran IPS terhadap Keterampilan Sosial peserta didik SMK RSBI di Jawa Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang peran mata pelajaran IPS terhadap kompetensi yang diharapkan dalam membangun keterampilan sosial SMK di Jawa Barat. Secara khusus penelitian ini :

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pembelajaran IPS dan keterampilan sosial peserta didik SMK RSBI di Jawa Barat
2. Memprediksi pengaruh efektifitas proses pembelajaran IPS terhadap keterampilan sosial peserta didik SMK RSBI di Jawa Barat.
3. Untuk mendapatkan masukan sebagai dasar pengambilan keputusan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian akan lebih bermakna apabila memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. Dalam segi keilmuan diharapkan penelitian ini nantinya dapat :

1. Memberikan gambaran mengenai efektivitas proses pembelajaran IPS dalam membangun keterampilan sosial peserta didik SMK RSBI di Jawa Barat.
2. Menambah ilmu pendidikan khususnya dalam mata pelajaran IPS dalam membangun keterampilan sosial peserta didik SMK di Jawa Barat (baik kelebihan maupun kekurangannya).
3. Menemukan konsep-konsep baru sebagai bahan masukan dalam pembuatan atau perumusan kurikulum pendidikan IPS yang lebih signifikan terhadap tujuan Pendidikan Nasional.

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi :

1. Badan Standarisasi Nasional Pendidikan sebagai pembuat kurikulum untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam kurikulum IPS terutama yang berkaitan dalam membangun keterampilan sosial. Agar kelas dapat menghasilkan materi IPS yang tepat sasaran dalam mengembangkan kemampuan peserta didik.
2. Memberikan bahan masukan pada guru IPS dalam menyusun rencana pembelajaran dan metode pembelajaran IPS agar proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Peserta didik SMK dapat

memiliki keterampilan sosial yang memadai sebagai bekal untuk bekerja di dunia industri dan atau di dunia usaha.

3. Memberikan fasilitas yang menunjang kepada guru dan peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran IPS dengan baik, sehingga peserta didik dapat mewujudkan hasil pembelajaran IPS yang mendukung upaya dalam membangun keterampilan sosial terutama di lingkungan sekolah.
4. Pembuat kebijakan di tingkat pusat, maka penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan di bidang pendidikan.

